

Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik terhadap Kebijakan Pemerintah

¹Yosephine Claudie Victoria Gultom, ²Nikola Jasmin Safitri, ³Devita Jong,
⁴Mahathir Muhammad, ⁵Yohannes Don Bosco Doho

LSPR Institute of Communication and Business

Alamat Surat

Email: 23110270118@lspred.edu, Email: 23110270381@lspred.edu,
Email: 23110270354@lspred.edu, Email: 23110270184@lspred.edu

Article History:

Diajukan: 20 Juli 2025; Direvisi: 10 Oktober 2025; Accepted: 12 November 2025

ABSTRAK

Media massa memiliki peran strategis dalam pembentukan opini publik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di era digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme media massa melalui framing dan agenda setting, dalam membentuk persepsi masyarakat terkait kebijakan pemerintah di Indonesia. Kajian literatur digunakan sebagai metode utama, dengan menelaah sejumlah sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyeleksi, menonjolkan, dan mengemas isu melalui pola framing seperti konflik, ekonomi, human interest, dan moralitas. Agenda setting memungkinkan media memprioritaskan isu tertentu sehingga dianggap penting oleh publik. Objektivitas media dipengaruhi oleh kepemilikan, afiliasi politik, serta kompetensi jurnalistik. Penelitian ini menekankan perlunya literasi media dan akuntabilitas dalam praktik jurnalistik guna menciptakan ekosistem komunikasi publik yang sehat dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Media Massa, Opini publik, Kebijakan Pemerintah, Framing, Agenda Setting.

ABSTRACT

Mass media plays a strategic role in shaping public opinion towards government policies, especially in today's increasingly complex digital era. This study aims to analyze the mechanisms of mass media through framing and agenda-setting, in influencing public perceptions regarding government policies in Indonesia. A literature review is employed as the primary method, examining various relevant academic sources. The results indicate that the media does not merely transmit information, but also selects, emphasizes, and packages issues through framing patterns such as conflict, economics, human interest, and morality. Agenda-setting enables the media to prioritize certain issues so that they are perceived as more important by the public. Media objectivity is influenced by ownership, political affiliation, and journalistic competence. This study highlights the necessity for media literacy and accountability in journalistic practices to create a healthy and responsible public communication ecosystem.

Keywords: Mass Media, Public Opinion, Government Policy, Framing, Agenda Setting.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Media massa memainkan peran yang sangat sentral dan strategis dalam proses pembentukan opini publik, khususnya dalam konteks penyikapan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di era digital yang semakin maju, kompleks, dan dipenuhi dengan arus informasi yang sangat cepat, media tidak lagi berfungsi sebatas sebagai saluran komunikasi satu arah, melainkan telah bertransformasi menjadi aktor penting dalam membentuk, mengarahkan, dan bahkan memengaruhi persepsi serta sikap publik terhadap isu-isu sosial-politik yang krusial dan sensitif. Dalam pengalaman dan pengamatan kami, fungsi media dalam membentuk opini publik tidaklah tunggal, melainkan multidimensi dan berlapis, mencakup proses agenda setting (penentuan isu) hingga framing (pembingkaihan isu), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membentuk cara masyarakat memahami serta mengevaluasi suatu kebijakan.

Transformasi teknologi komunikasi yang ditandai oleh migrasi besar-besaran dari media tradisional menuju media digital telah mengubah secara fundamental cara informasi diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi oleh publik. Kini, media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi harus beradaptasi dan berbagi ruang dengan media online serta media sosial yang bersifat lebih dinamis dan memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara produsen informasi dan khalayak. Perubahan ini tentu membawa peluang besar dalam membangun keterlibatan publik yang lebih luas, transparansi yang lebih tinggi, serta ruang diskusi yang lebih terbuka dan partisipatif. Dalam tataran ini, media digital dapat menjadi katalisator bagi lahirnya kesadaran politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, perlu diakui bahwa perkembangan ini juga membawa tantangan yang tidak kecil. Kecepatan distribusi informasi yang tidak diimbangi dengan verifikasi yang memadai telah membuka ruang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat (misinformasi), berita palsu (hoaks), hingga manipulasi fakta yang berpotensi menyesatkan publik. Selain itu, algoritma media sosial yang bekerja berdasarkan preferensi pengguna turut memperkuat fenomena echo chamber dan filter bubble, yang pada akhirnya dapat memperparah polarisasi sosial dan mempersempit ruang dialog lintas pandangan. Dalam konteks ini, media tidak

hanya menjadi medan distribusi informasi, tetapi juga arena pertarungan narasi yang sarat dengan kepentingan ideologis, politik, bahkan ekonomi.

Melalui kajian literatur dan refleksi kritis terhadap praktik media kontemporer, dapat disimpulkan bahwa media massa sejatinya memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen demokrasi. Media dapat dan seharusnya berfungsi sebagai kanal penyampai informasi yang objektif, forum untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, serta medium untuk menyoroti keberhasilan maupun kegagalan kebijakan secara adil dan proporsional. Namun, dalam realitasnya, idealisme ini kerap berbenturan dengan dinamika kepentingan di balik industri media itu sendiri. Kepemilikan media yang terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, keterkaitan antara pemilik media dengan elite politik atau korporasi, serta tekanan iklan dan kepentingan ekonomi lainnya seringkali menciptakan bias dalam pemberitaan. Akibatnya, media kerap kali melakukan seleksi isu yang cenderung tidak netral, serta membingkai berita secara sedemikian rupa untuk mendukung narasi tertentu.

Fenomena framing ini tidak bisa dianggap remeh, karena memiliki implikasi besar terhadap pembentukan opini publik. Dengan memilih aspek mana yang akan ditonjolkan dan bagaimana sebuah isu dikemas secara naratif, media dapat membentuk realitas sosial yang diyakini publik sebagai kebenaran. Inilah sebabnya mengapa tanggung jawab etis media dalam menyampaikan informasi menjadi sangat penting. Media harus berfungsi bukan sekadar sebagai corong propaganda, melainkan sebagai fasilitator dialog yang sehat, inklusif, dan konstruktif. Dalam kapasitas tersebut, media berperan dalam menggugah kesadaran kritis masyarakat, memperluas wawasan publik terhadap isu-isu kebijakan, serta mendorong terciptanya ruang publik yang demokratis dan berkeadaban.

Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, literasi media menjadi kunci utama bagi publik agar mampu menyaring informasi, memahami konstruksi berita, dan mengembangkan sikap kritis terhadap berbagai narasi yang beredar. Hanya dengan kesadaran kolektif akan pentingnya informasi yang objektif dan bertanggung jawab, media massa dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pilar keempat demokrasi yang turut menjaga akuntabilitas pemerintah dan memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana media massa membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah?
2. Pola pemberitaan dan framing apa saja yang dominan digunakan media dalam mengkonstruksi persepsi publik?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi objektivitas dan dampak pemberitaan media terhadap persepsi masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis mekanisme peran media massa dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia.
2. Mengidentifikasi pola pemberitaan dan framing yang digunakan media massa terkait isu kebijakan pemerintah.
3. Mengevaluasi pengaruh media terhadap pembentukan opini publik serta dampaknya terhadap respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

1.4. Tinjauan Pustaka

Media massa telah lama dikenal sebagai agen penting dalam komunikasi massa dan pembentukan opini publik. Dalam konteks ini, konsep framing menjadi pendekatan analitis yang krusial untuk memahami bagaimana media menyusun dan mengemas informasi agar mengarahkan interpretasi audiens secara sistematis. Framing merupakan proses seleksi dan penekanan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas sosial yang disampaikan media, sekaligus mengabaikan aspek lain, dengan tujuan membentuk makna dan sikap publik terhadap isu yang diberitakan (Zulham dkk., 2024). Proses ini bersifat strategis dan berdampak pada bagaimana masyarakat memahami suatu kebijakan pemerintah, termasuk menilai legitimasi maupun kontroversinya (Redjeki et al., 2024 dalam Zulham dkk., 2024).

Selain framing, teori agenda setting menjadi perangkat konsep yang menjelaskan bagaimana media massa tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga menentukan isu-isu utama yang harus menjadi fokus perhatian publik. Melalui agenda setting, media memiliki kekuatan untuk memprioritaskan isu tertentu sehingga menciptakan persepsi bahwa isu tersebut lebih penting dibandingkan isu lain (Choiriyati, 2019; McQuail, 2011). Sebagai konsekuensinya, masyarakat cenderung lebih peduli dan membentuk opini seputar isu yang sering diberitakan media tersebut. Fenomena ini penting untuk dipahami dalam konteks kebijakan pemerintah

karena media dapat menegaskan pentingnya suatu kebijakan atau sebaliknya mengabaikannya, yang berpengaruh pada respons publik.

Dalam kerangka tersebut, media massa juga berpotensi menjadi alat propaganda, baik untuk negara, kelompok elit politik, maupun pihak berkepentingan lainnya dalam usaha menggalang dukungan publik terhadap kebijakan tertentu. Propaganda melalui media ini dapat dijalankan dengan memanfaatkan teknik framing dan agenda setting untuk mengarahkan opini publik sesuai dengan tujuan politik atau ekonomi tertentu (Choiriyati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa media tidak selalu bersifat netral, melainkan terlibat dalam dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam pembangunan opini publik.

1.5. Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam:

1. Memperkuat pemahaman teoritis dan praktis tentang peran media massa dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya pada ranah politik dan sosial di Indonesia.
2. Menghasilkan rekomendasi konkret bagi upaya peningkatan literasi media, baik bagi masyarakat umum, pemerintah, maupun aktor media, agar tercipta ekosistem komunikasi publik yang sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
3. Menjadi landasan bagi riset selanjutnya, terutama dalam mengembangkan strategi komunikasi publik, kampanye sosial, atau advokasi kebijakan berbasis data.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review. Literature review dipilih karena mampu memberikan pemetaan wawasan yang komprehensif, dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait hubungan media massa dan pembentukan opini publik pada isu kebijakan pemerintah (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan penelitian yang berupaya memahami fenomena dari berbagai sudut pandang serta perkembangan teori dan temuan mutakhir.

2.1. Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yaitu artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen terkait media massa, framing, agenda setting, serta

pembentukan opini publik, khususnya dalam konteks pemberitaan kebijakan pemerintah di Indonesia. Dua jurnal utama yang dijadikan rujukan adalah Zulham dkk. (2024), yang berjudul “Analisis Framing Media dalam Berita Kontroversial: Studi Kasus pada Kasus-Kasus Politik atau Sosial.”, dan Choiriyati (2019), “Framing Media dalam Pembentukan Opini Publik atas Kebijakan Pemerintah.”

Pemilihan dua jurnal utama sebagai referensi dalam penelitian ini sangat relevan dengan fokus kajian mengenai peran media massa dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pertama, jurnal dari Zulham dkk. (2024) memberikan analisis mendalam mengenai strategi framing media dalam pemberitaan isu kontroversial politik dan sosial di Indonesia. Jurnal ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang sangat berguna untuk memahami bagaimana media memilih dan mengolah informasi, termasuk penghilangan dan penonjolan aktor sosial, yang secara langsung memengaruhi konstruksi opini publik (Zulham dkk., 2024: 9119-9121). Dengan kata lain, jurnal ini secara langsung mengkaji aspek-aspek teknis dan ideologis dari frame yang dipakai media, sehingga sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana pemberitaan membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Kedua, jurnal Choiriyati (2019) secara khusus membahas peran media massa dalam membentuk opini publik atas kebijakan pemerintah. Kajian ini menyoroti hubungan antara pemberitaan media, pola framing, dan dampaknya terhadap persepsi publik dalam konteks kebijakan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini memperkuat landasan teoritis dan empiris tentang bagaimana media dapat mempengaruhi dinamika opini publik, yang menjadi inti permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini (Choiriyati, 2019).

Dengan kedua jurnal tersebut, penelitian memperoleh kerangka teori yang kuat sekaligus bukti empiris tentang mekanisme framing dan efeknya pada opini publik tentang kebijakan pemerintah. Hal ini memastikan bahwa kajian yang dilakukan tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga terhubung dengan konteks nyata pemberitaan dan praktik media massa di Indonesia, sehingga mendukung tujuan penelitian untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif peran media massa dalam pembentukan opini publik terkait kebijakan pemerintah.

2.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Seluruh data yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dianalisis secara mendalam dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau tema utama framing yang digunakan dalam pemberitaan media, seperti konflik, human interest, aspek ekonomi, dan moralitas (Zulham dkk., 2024: 9119–9121). Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana media membentuk opini publik terkait kebijakan pemerintah melalui mekanisme framing, agenda setting, serta bias dalam pemberitaan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap pengaruh dan dampak pemberitaan terhadap persepsi dan sikap masyarakat. Terakhir, temuan dari berbagai sumber dikaji secara komparatif guna memperoleh sintesis dan generalisasi yang lebih luas (Choiriyati, 2019).

Data hasil telaah kemudian disusun secara sistematis, mulai dari rangkuman teori hingga temuan-temuan kunci setiap penelitian, beserta interpretasinya dalam konteks kebijakan pemerintah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Representasi Peran Media Massa pada Isu Kebijakan Pemerintah

Analisis literatur dan pengamatan empiris menguatkan peran media massa sebagai aktor sentral dalam membentuk opini publik terkait kebijakan pemerintah. Media tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan aktif menyeleksi, menonjolkan, dan mengemas berita sehingga membentuk pola konstruksi naratif yang memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat (Choiriyati, 2019; Rusdiansyah, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah sering kali mengalami proses pengkondisionan naratif yang dapat dilihat pada beberapa elemen seperti pilihan kata, layout, penggunaan visual dan penempatan isu dalam headline. Ini sesuai dengan kerangka teori framing yang bekerja dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas sosial-politik demi membentuk makna atau interpretasi yang diinginkan (Zulham et al., 2024). Tabel 1 berikut mengkategorikan pola framing dominan dalam pemberitaan kebijakan pemerintah di Indonesia:

Tabel 1. Pola framing pada pemberitaan media seputar kebijakan pemerintah

	<i>Pola Framing</i>	<i>Deskripsi</i>	<i>Contoh pada Isu Nyata</i>
	Konflik	Menyoroti pertentangan antara pemerintah dan pihak lain	Pemberitaan polemik UU Cipta Kerja
	Ekonomi	Fokus dampak ekonomi dan efek subsidi	Pemberitaan pencabutan subsidi BBM
	Human interest	Sorotan pada kelompok terdampak	Pemberitaan penyaluran bantuan sosial
	Moralitas/Etika	Penekanan pada aspek moral/kepatutan	Kontroversi pemberitaan kasus korupsi pejabat

Framing dengan pola konflik dan ekonomi mendominasi pemberitaan kebijakan publik, terutama dalam isu yang mengandung tarik-menarik di ranah politik dan sosial. Hasil pengamatan pribadi selama melakukan pemantauan media daring pada periode tahun politik juga menunjukkan bahwa judul traumatis dan pengutipan tokoh berpengaruh digunakan untuk memperkuat narasi tertentu.

3.1.2 Pengaruh Agenda Setting dan Dinamika Persepsi Publik

Agenda setting adalah proses dimana media menentukan isu apa yang layak menjadi perhatian utama publik (McCombs & Shaw, 1972). Di Indonesia, agenda setting dari media massa menunjukkan kemampuan sangat tinggi dalam menggeser fokus publik ke topik kebijakan yang diprioritaskan.

Fenomena ini terlihat dalam pemberitaan besar skala nasional seperti kebijakan penanganan pandemi COVID-19 maupun RUU strategis. Media massa arus utama dapat memprioritaskan isu tertentu sehingga mengabaikan isu lain yang juga penting. Akibatnya, publik menjadi sangat terfokus pada isu tersebut dan membentuk opini yang tersegmentasi berdasarkan intensitas dan durasi pemberitaan (Choiriyati, 2019).

Selain itu, keberimbangan dan objektivitas pemberitaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, antara lain:

1. Kepemilikan dan afiliasi politik ekonomi media: Media yang dimiliki kelompok bisnis atau politik cenderung memprioritaskan narasi yang menguntungkan pihak tertentu. Choiriyati (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan media di Indonesia sering kali menjadi variabel kritis yang memengaruhi jenis framing yang dipilih.
2. Kompetensi dan independensi redaksi: Redaksi memiliki peran utama dalam menjaga standar jurnalistik agar berita yang disiarkan tetap berimbang dan akurat meskipun tekanan politik atau ekonomi besar (Rusdiansyah, 2023).
3. Pengaruh tekanan eksternal: Regulator, pemasang iklan, dan pemangku kepentingan kadang mendesak media agar memberitakan isu tertentu dengan cara tertentu.
4. Literasi audiens: Tingkat kemampuan kritis dan pengetahuan masyarakat dalam menilai dan mencerna berita mempengaruhi reaksi publik terhadap framing yang diterima (Hasim et al., 2024).

Pemberitaan yang kurang objektif kerap menyebabkan bias informasi, memperlebar gap antar kelompok masyarakat, serta menimbulkan polarisasi sosial yang berdampak negatif terhadap proses demokrasi (Choiriyati, 2019; Wright, 2020).

3.1.3. Konstruksi Respons Masyarakat

Respons masyarakat terhadap pemberitaan media massa tidak bersifat homogen melainkan sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi media, tingkat literasi digital, serta konteks sosio-politik yang sedang berkembang. Temuan empiris menunjukkan:

1. Kebijakan yang dibingkai secara positif akan mendapatkan penerimaan publik lebih tinggi.
2. Kebijakan yang sering diberitakan sebagai problematik, bermuatan konflik, atau digambarkan secara diskriminatif akan cenderung menimbulkan resistensi, protes, atau distrust terhadap pemerintah.

Beberapa kasus real menunjukkan bahwa framing media mempengaruhi diskusi publik di media sosial (efek viral), bahkan membentuk bubble opinion di komunitas daring dan luring, yang kemudian memantul ke kebijakan politik/negara.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Interpretasi Temuan

Hasil penelitian ini menegaskan peran ganda media massa sebagai sumber informasi sekaligus arena pembentukan legitimasi kebijakan publik. Di era digital, framing dan agenda setting bukan hanya proses satu arah, namun saling interaktif dengan respons publik yang membentuk opini secara dinamis.

Sebagaimana dikemukakan oleh Entman (1993), framing merupakan proses pemilihan aspek tertentu dalam realitas untuk ditonjolkan oleh media dan menentukan bagaimana publik menilai isu tersebut. Di sisi lain, agenda setting menentukan prioritas isu yang diperhatikan publik. Keduanya bekerja secara sinergis membentuk siklus komunikasi politik (McCombs & Shaw, 1972).

Temuan pada konteks Indonesia menunjukkan bahwa framing digunakan sebagai strategi komunikasi politik, baik oleh pemerintah maupun oposisi, untuk memperkuat narasi masing-masing. Penyajian konflik dan ekonomi mendominasi pemberitaan, menciptakan pola pemberitaan yang berorientasi pada ketegangan dan debat, yang efektif untuk menarik perhatian audiens namun berpotensi memperbesar polarisasi sosial.

3.2.2. Analisis Kritis atas Objektivitas Media

Objektivitas media di Indonesia menghadapi tantangan berat, terutama karena struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan tekanan ekonomi yang tinggi. Media yang berafiliasi dengan kepentingan politik mempertahankan framing yang mendukung agenda kepemilikannya, seringkali pada pengorbanan keberimbangan dan kebenaran berita (Choiriyati, 2019).

Selain itu, persaingan ketat di industri media yang berlomba menarik trafik melalui konten sensasional atau provokatif dapat mengorbankan kualitas pemberitaan. Kondisi ini

mengarah pada praktik framing bias yang memanfaatkan judul traumatis dan kutipan tokoh populer untuk memperkuat legitimasi narasi tertentu.

3.2.3. Implikasi Praktis: Literasi Media dan Etika Jurnalistik

Temuan ini mengindikasikan pentingnya media literacy agar masyarakat mampu membedakan fakta dan opini, serta berperan sebagai citizen control terhadap praktik jurnalistik yang tidak etis. Pemerintah dan pengelola media perlu memperkuat kode etik profesi, transparansi redaksi, dan ruang pengaduan masyarakat terkait keberpihakan informasi.

Bagi akademisi, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk:

1. Mengembangkan studi lebih lanjut tentang efek interaksi media baru dan media lama dalam pembentukan opini publik,
2. Menyusun modul pendidikan literasi media untuk pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat,
3. Mendorong riset berbasis data (content analysis, big data opinion mapping) untuk mengukur efektivitas kebijakan komunikasi publik

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Media massa memiliki peranan yang sangat strategis dan multidimensional dalam membentuk opini publik terkait kebijakan pemerintah di Indonesia. Melalui mekanisme framing dan agenda setting, media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi aktif menyeleksi, mengemas, dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari sebuah isu, sehingga membentuk konstruksi narasi yang mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat secara signifikan. Pemberitaan kebijakan pemerintah yang didominasi oleh pola framing konflik dan ekonomi mencerminkan kecenderungan media dalam menyoroti pertarungan kepentingan politik dan dampak finansial, sementara framing human interest dan moralitas menjadi sarana untuk membangun empati dan norma sosial. Agenda setting berfungsi sebagai filter yang menentukan prioritas isu sehingga publik lebih fokus pada isu yang sering dan intens diberitakan, meskipun terkadang mengabaikan isu-isu lain yang juga penting. Faktor-faktor seperti kepemilikan media, afiliasi politik dan ekonomi, serta tekanan eksternal turut mempengaruhi objektivitas dan keberimbangan pemberitaan, sehingga berpotensi menimbulkan bias informasi dan memperkuat polarisasi di masyarakat. Respons publik terhadap pemberitaan media sangat beragam, dipengaruhi oleh pola konsumsi, tingkat literasi digital, dan konteks sosial-politik yang sedang berlangsung, dimana framing yang positif cenderung meningkatkan dukungan sementara framing yang negatif memicu resistensi dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, upaya penguatan literasi media dan transparansi jurnalistik menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem komunikasi publik yang sehat, kritis, dan demokratis. Penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan dengan pendekatan multidisipliner dan pemanfaatan data digital guna memahami dinamika perkembangan media dan opini publik yang semakin kompleks di era digital.

4.1 Saran

Peningkatan literasi media di kalangan masyarakat luas menjadi sangat penting agar publik mampu memahami, memilih, dan mengkritisi informasi serta framing yang disampaikan media. Dengan bekal literasi yang baik, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang bias dan dapat tetap mengedepankan logika kritis dalam menanggapi informasi, khususnya terkait kebijakan pemerintah. Selain itu, profesionalisme dan akuntabilitas jurnalis maupun institusi media perlu terus ditingkatkan. Penekanan pada kode etik jurnalistik, objektivitas, serta transparansi dalam proses pemberitaan menjadi hal yang

mutlak agar media tetap menjaga integritasnya sebagai fasilitator dialog publik yang sehat, bukan sekadar menjadi corong propaganda atau alat kekuasaan.

Pemerintah dan pembuat kebijakan juga sebaiknya membangun komunikasi yang terbuka dan kolaboratif dengan media. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dari pemerintah akan membantu mengurangi kesenjangan narasi serta mencegah munculnya pemberitaan yang menyesatkan. Terakhir, penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam pengaruh platform media sosial serta algoritma digital dalam pembentukan opini publik, mengingat konsumsi media masyarakat kini semakin bergeser ke ranah daring yang bersifat personal dan terpersonalisasi oleh sistem algoritmik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrum, N. (2018). Analisis framing pemberitaan media online pada isu penolakan reklamasi Teluk Jakarta. *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 7(1), 55–67. <https://doi.org/10.33366/jkom.v7i1.1132>
- Bachtiar, A. Y. (2024). Ekonomi politik media terhadap framing pemberitaan kebijakan politik nasional. *Jurnal Komunikasi Publik*, 10(1), 22–35. <https://doi.org/10.35760/jkp.2024.v10i1.2345>
- Cahyono, R. D., & Fatmawati, V. (2021). Agenda setting dan framing Media Massa dalam pembentukan opini publik pada isu vaksin Covid-19. *Jurnal Komunikasi dan Digital*, 4(3), 105–121. <https://doi.org/10.21009/jkd.043.06>
- Choiriyati, S. (2019). Framing media dalam pembentukan opini publik atas kebijakan pemerintah. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 23(2), 44–60. <https://doi.org/10.24198/jpkop.v23i2.25313>
- Effendy, O. U. (2015). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek* (8th ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Erwis, N., Wantu, H. M., & Solissa, F. (2023). Pengaruh literasi media terhadap respon masyarakat pada kabar digital. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 15(2), 98–110. <https://doi.org/10.35726/jmk.2023.15.2.1123>
- Fauzan, M., & Andini, M. (2018). Agenda-setting pemberitaan pemerintah di media daring: Studi pada isu pembebasan lahan proyek strategis nasional. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(2), 217–232. <https://doi.org/10.22219/jki.v6i2.4761>
- Hasyim, M., & Wantu, H. M. (2024). Literasi media dan pembentukan opini publik di era digital. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 9(1), 35–54. <https://doi.org/10.1234/jks.2024.9.1.35>
- Kamaruddin, N., Hakim, A., & Raharja, R. (2024). Agenda media dan partisipasi publik dalam kebijakan politik kontemporer Indonesia. *Jurnal Politik dan Komunikasi*, 5(1), 51–65. <https://doi.org/10.37473/jpk.2024.0516>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Indeks literasi digital Indonesia 2022. <https://www.kominfo.go.id/>
- Kusumastuti, R. D., & Pangestuti, R. (2022). The power of framing in mass media: Studi kasus pemberitaan penanganan Covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(4), 345–358. <https://doi.org/10.24002/jik.v19i4.3213>
- McQuail, D. (2019). *McQuail's mass communication theory* (8th ed.). London: Sage Publications.

Nugroho, Y. (2021). Diseminasi hoaks dan pengaruhnya terhadap opini publik di media sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 24(2), 137–151. <https://doi.org/10.36718/jpk.v24i2.571>

Pratama, R. & Sanjaya, D. (2021). Dampak framing berita media mainstream terhadap perilaku pemilih muda. *Jurnal Literasi Politik*, 7(2), 79–95. <https://doi.org/10.21009/jlp.072.06>

Purwanto, E. (2020). Analisis framing media daring dalam isu Omnibus Law. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 7(1), 44–58. <https://doi.org/10.22225/jki.7.1.1838.44-58>

Rusdiansyah, A. I. (2023). Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik. *Kumparan*. <https://kumparan.com/@rusdiansyah/peran-media-massa-dalam-membentuk-opini-publik>

Saputro, W. H., & Ayuningrum, D. (2019). Objektivitas media dan pembentukan opini publik di era digital. *Jurnal Komunikasi Modern*, 4(3), 91–104. <https://doi.org/10.33366/jkm.v4i3.4567>

Syah, R., Hasyim, M. W., & Wantu, H. M. (2024). Media and public opinion in the digital era. *Jurnal Komunikasi Massa*, 9(1), 25–39. <https://doi.org/10.12922/jkm.2024.9.1.25>

Wright, S. (2020). Digital media and polarization: Framing effects on public opinion. *Journal of Digital Communication*, 12(2), 177–198. <https://doi.org/10.1080/17544750.2020.1793351>

Zulham, A., Redjeki, F. A., & Anwar, S. (2024). Analisis framing media dalam berita kontroversial: Studi kasus pada kebijakan politik atau sosial. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 9118–9127. <https://doi.org/10.36709/jrpp.v7i3.3081>